

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam membela dan membangun tanah air dan negara. Walaupun pajak memiliki sifat memaksa tetapi terdapat aturan dalam pengenaan, pemungutan, dan penarikan pajak oleh negara atau pemerintah dan tidak dilakukan secara semena-mena. Hal tersebut sesuai dengan pasal 23A UUD 1945 (amandemennya) yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang.

Salah satu fungsi pajak digunakan sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea materai.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya sendiri. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Otonomi daerah memacu setiap daerah untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang mampu mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Dasar dilakukan pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan antar Pemerintahan Daerah perlu diatur secara adil dan selaras. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan

Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan.

Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, maka sumber pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada peranan pendapatan asli daerah. Hal ini, dimaksudkan agar dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Peningkatan penerimaan ini akan memperbesar keleluasaan daerah dalam menggunakan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Sumber - sumber penerimaan daerah diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah. Sumber -sumber penerimaan daerah berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat serta penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun, setiap daerah memiliki kekayaan alam yang berbeda -beda yang akan mendorong terjadinya perbedaan yang mencolok dalam pengembangan daerah. Daerah yang kaya akan potensi alam yang dimiliki akan semakin maju dan daerah yang kurang akan potensi alam tidak berkembang bahkan semakin terpuruk sehingga diperlukannya peran pemerintah agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata.

Penggalan dan pengelola keuangan daerah dengan segala sumber daya yang ada merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah. Terbatasnya dana yang dapat dihimpun dari sumber PAD akan mendorong pemerintah dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

Berikut ini tabel penerimaan pajak daerah, pajak hotel, pajak restoran dan pendapatan asli daerah selama 3 tahun yaitu tahun 2013, 2014, dan 2015 :

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang
Tahun Anggaran 2014-2016

Tahun Anggaran	Penerimaan Pajak Daerah
2013	357.230.028.259,12
2014	463.574.599.151,32
2015	479.112.899.223,00

Sumber: BPPD Kota Palembang (2017)

Dari tabel 1.1 dapat dilihat penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2013-2014 mengalami peningkatan sebesar Rp.106.344.570.892,20, pada tahun 2014-2015 juga mengalami peningkatan sebesar Rp.15.538.300.071,68.

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Kota Palembang
Tahun Anggaran 2014-2016

Tahun Anggaran	Penerimaan Pajak Hotel	Penerimaan Pajak Restoran
2013	30.720.894.276,20	35.926.603.685,26
2014	38.869.545.560,00	45.527.716.420,82
2015	43.539.617.438,00	57.718.132.607,00

Sumber: BPPD Kota Palembang (2017)

Dari tabel 1.2 dapat dilihat penerimaan pajak hotel dan restoran dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2013-2014 pajak hotel mengalami peningkatan sebesar Rp. 8.148.651.283,80 sedangkan untuk pajak restoran sebesar Rp.9.601.112.735,56, pada tahun 2014-2015 pajak hotel maupun restoran juga mengalami peningkatan untuk pajak hotel sebesar Rp. 4.670.071.878,00 dan pajak restoran sebesar Rp. 12.190.416.186,18.

Tabel 1.3
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang
Tahun Anggaran 2013-2015

Tahun Anggaran	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)
2013	689.103.604.093,88
2014	728.123.306.512,64
2015	734.820.204.068,92

Sumber: BPPD Kota Palembang (2017)

Dari tabel 1.3 dapat dilihat penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun 2013 ke tahun 2015 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2013-2014 mengalami peningkatan sebesar Rp.39.019.702.418,76, pada tahun 2014-2015 juga mengalami peningkatan sebesar Rp.6.696.897.556,28.

Kota Palembang mempunyai potensi pajak daerah yang masih harus digali oleh pemerintah setempat. Sumber-sumber penerimaan PAD Kota Palembang yang berasal dari pajak daerah diantaranya adalah: (1) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), (2) Pajak Reklame, (3) Pajak Restoran, (4) Pajak Air Tanah, (5) Pajak Sarang Burung Walet, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), (8) Pajak Hotel, (9) Pajak Hiburan, (10) Pajak Parkir, (11) Pajak Penerangan Jalan.

Mengingat Kota Palembang mempunyai potensi wisata yang tidak kalah dengan kota lainnya di Indonesia, diduga kontribusi pajak yang digali dari sektor hotel dan restoran dapat meningkatkan PAD. Semakin berkembangnya kota Palembang akan berdampak positif terhadap jumlah pengunjung baik oleh pengusaha, menuntut untuk mampu menyediakan fasilitas baik berupa sarana maupun prasarana untuk mendukung perkembangan daerah. Oleh karena itu dengan tuntutan berbagai fasilitas seperti hotel dan restoran akan menjadi peluang bagi daerah untuk meningkatkan upaya penggalan dan perolehan sumber pendapatan dari sektor ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul laporan akhir ini **“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti :

1. Bagaimana Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang?
2. Bagaimana Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan agar dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, yaitu tentang kontribusi pajak Hotel dan Restoran Kota Palembang berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah. Data yang akan dianalisis adalah Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran, Pendapatan Asli Daerah tahun 2013-2015.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan yang dikemukakan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui :

1. Kontribusi pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.
2. Kontribusi pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penulisan

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman penulis dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.

b. Bagi Instansi

Sebagai sumbangan pemikiran untuk pemerintah daerah kota Palembang dalam mengambil kebijakan sehubungan dengan realisasi pajak hotel dan restoran dalam mengoptimalkan PAD.

c. Bagi Lembaga

Sebagai sumber bahan bacaan dan referensi di perpustakaan Politeknik Negeri Sriwijaya khususnya di jurusan Akuntansi.

1.5 Metode Pengumpulan dan Sumber Data

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Data merupakan sesuatu yang telah terjadi yang kemudiandiproses sehingga menjadi fakta yang dapat dijadikan bukti untuk mendukung analisis terhadap permasalahan yang dibahas. Dalam penulisan laporan akhir ini, dibutuhkan data yang akurat dan objektif untuk kemudian digunakan sebagai alat pengambilan keputusan atau pemecahan masalah.

Menurut Sanusi (2016:110-114) ada empat cara pengumpulan data yang dapat dilakukan diantaranya yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau apabila tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat komunikasi misalnya pesawat telepon.

2. Kuisisioner

Pengumpulan data sering tidak memerlukan kehadiran peneliti, namun cukup diwakili oleh daftar pertanyaan (kuisisioner) yang telah disusun secara cermat terlebih dahulu. Kuisisioner dapat diberikan kepada responden melalui beberapa cara: (1) disampaikan langsung oleh peneliti kepada responden; (2) dikirim bersama-sama dengan baranglain, seperti paket, majalah dan sebagainya; (3) ditempatkan ditempat-tempat yang ramai dikunjungi orang; maupun (4) dikirim melalui pos, faksmail atau menggunakan teknologi komputer (e-mail).

3. Cara Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Observasi meliputi segala hal yang menyangkut pengamatan aktivitas atau kondisi perilaku maupun nonperilaku.

4. Cara Dokumentasi

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti: laporan keuangan, rekapitulasi personalia, struktur organisasi, peraturan-peraturan, data produksi, surat wasiat, riwayat hidup, riwayat perusahaan, dan sebagainya, biasanya telah tersedia di lokasi penelitian.

Merujuk pada Sanusi (2016:110-114), penulis menggunakan teknik pengumpulan data Dokumentasi berupa data realisasi pajak hotel dan restoran, pajak daerah, dan penerimaan pendapatan asli daerah.

1.5.2 Sumber Data

Dari kegiatan pengumpulan data, penulis membagi menjadi dua data yang objektif dan diperlukan untuk mendukung penyusunan laporan akhir ini. Menurut Sanusi (2016:104) data tersebut dibagi menjadi dua :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh penulis.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.

Merujuk pada Sanusi (2016:104), penulis menggunakan sumber data sekunder berupa penerimaan pendapatan asli daerah, pajak daerah, pajak hotel dan pajak restoran tahun 2013, 2014, dan 2015.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi Laporan Akhir secara ringkas dan jelas. Laporan ini terdiri dari lima bab yang mana masing-masing bab dibagi menjadi beberapa subbab. Berikut ini sistematika penulisan laporan akhir yang dimaksud.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan dan sumber data, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis mengemukakan pendapat para ahli mengenai teori-teori pendapatan asli daerah, pengertian pajak daerah, jenis pajak daerah, pengertian dan jenis retribusi daerah.

BAB III GAMBARAN UMUM

.Dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran mengenai profil kota Palembang, antara lain Mengenai Sejarah singkat kota Palembang, keadaan geografis, pemerintahan, penduduk dan data pajak-pajak daerah.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Palembang terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan pada bab IV, serta saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi pemerintah kota Palembang agar dapat mengoptimalkan pajak hotel dan restoran.